

Pengaruh Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan Pesantren Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Pesantren di Kota Bogor)

¹Tiara Ratu Balqis, ²Agus Cahyana, ³Desmy Riani

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

²Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

¹⁻³Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat

²Jl. Kumbang No.14, RT.02/RW.06, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat

Info Artikel

Kata Kunci:
Akuntabilitas publik, laporan keuangan pesantren, pengakuan, pengukuran, penyajian.

ISSN (print): 1978-6387
ISSN (online): 2623-050X

Abstraksi

Pondok Pesantren sebagai organisasi nirlaba memiliki kewajiban untuk melaporkan pembukuan keuangannya demi mencapai akuntabilitas publik yang baik. Namun, berdasar pengamatan, masih sangat sedikit pondok pesantren yang sudah mencatat dan membukukan transaksi keuangannya. Hal ini dikarenakan kemampuan dan jumlah staf administrasi yang tidak memadai, juga tingkat kepercayaan masyarakat dan donatur yang tinggi kepada sosok kyai yang memimpin pondok pesantren, sehingga tidak menjadi tuntutan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pesantren terhadap akuntabilitas publik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner pada 66 pondok pesantren di Kota Bogor yang dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak pondok pesantren di Kota Bogor yang tidak paham bagaimana cara mengakui, mengukur, dan menyajikan laporan keuangan dengan baik, sehingga tidak adanya pelaporan kepada stakeholder. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pengukuran dan penyajian laporan keuangan pesantren terhadap akuntabilitas publik. Namun, pengakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pesantren secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Abstract

Keywords:
Islamic boarding schools' financial statements, measurement, presentation, public

Islamic boarding school as a non-profit organizations have obligations to report their financial books to achieve a good public accountability. However, based on the results of previous research, there are still very few Islamic boarding schools that have recorded their financial transactions. This is due to inadequate capacity and number of

accountability,
recognition..

Korespondensi Penulis:

Tiara Ratu Balqis

Agus Cahyana

Desmy Riani

Email:

tiarabalqis.tu@gmail.com

acahyana19@gmail.com

desmy@uika-bogor.ac.id



administrative staff, also a high level of public trust in the figure of kyai who leads the boarding school, so there is no demand to make an accountability report. The purposes in this research is to discover the effect of recognition of measurement and presentation of Islamic boarding school financial statements on public accountability. In this study, researchers used quantitative methods, by distributing questionnaires to 66 Islamic boarding schools in Bogor City which were used as research samples. The results of this study indicate that there are still many Islamic boarding schools in Bogor City that do not understand how to properly recognize, measure, and present financial reports, so that there is no reporting to stakeholders. The researcher hereby concludes that there is a significantly influential between measurement and presentation of Islamic boarding schools' financial statements on public accountability. However, that there is no significantly influential of recognition of Islamic boarding schools' financial statements on public accountability. Whereas recognition, measurement, and presentation of Islamic boarding schools' financial statements simultaneously is significantly influential on public accountability.

1. Pendahuluan

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan independen dengan kyai sebagai perintis, pengelola, dan pengembangnya, yang juga memiliki peran sebagai tempat internalisasi ajaran Agama Islam kepada santri dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar santri memiliki kebiasaan dan prilaku yang baik sesuai tuntunan syariat dan berguna bagi lingkungan di sekitarnya (Susilo & Wulansari, 2020). Menurut Sujarweni (2015: 215) organisasi nirlaba mendapatkan modal dari dana-dana anggota atau donatur, yang para anggota dan donatur tersebut tidak mengharapkan pengembalian atas donasi yang telah diberikan. Pondok Pesantren sebagai organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari berbagai macam sumber untuk melakukan aktivitas kegiatannya, baik internal maupun eksternal. Sumber daya tersebut biasanya berupa sumbangan uang, perabotan, sampai wakaf berupa tanah.

Keberadaan Pondok Pesantren di Indonesia semakin dipercaya masyarakat dengan jumlah Pondok Pesantren yang telah mencapai 36.737 per Februari 2022, dan

sebanyak 11.307 bertempat di Jawa Barat (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022). Yang 193 diantaranya berada di Kota Bogor, Jawa Barat. Melihat perkembangan ini, penting dilakukan penguatan dan peningkatan manajemen Pondok Pesantren, terutama pada aspek pengelolaan keuangan. Jika berbicara mengenai pengelolaan keuangan tentu tidak dapat terlepas dari aktivitas akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi. Pengelolaan keuangan ini harus didasari oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga semua pengeluaran atau pemasukan baik berupa uang atau benda lainnya, juga yang berasal dari pemerintah ataupun masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan sebagai output dari pengelolaan keuangan merupakan instrumen penting untuk mencapai akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018: 177). Pesantren sebagai organisasi nirlaba (non-profit), tidak menjadi pengecualian untuk terlepas dari kewajiban menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, karna itu merupakan bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan oleh para donatur. Sistem keuangan syariah semakin berkembang, hal

ini ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan syariah (Riani, 2019).

Setiap perusahaan pasti menerapkan berbagai strategi agar dapat bersaing dan bertahan di dunia usaha dengan persaingan yang semakin ketat (Cahyana et al., 2022). Kemampuan dalam melakukan identifikasi, mencatat, serta menyajikan laporan keuangan juga akan meningkatkan kepercayaan para stakeholder untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan Pondok Pesantren. Namun, pada kenyataannya kebanyakan pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren terbatas pada dana atau sumber daya yang berbentuk uang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang diungkapkan (Azmi, 2019; Darmi, 2021; Tania, 2020; Yohani, 2019) bahwa kebanyakan pelaporan keuangan pada Pondok Pesantren masih bersifat sederhana, hanya sebatas pemasukan, pengeluaran, dan pelaporan akhir saldo kas. Sedangkan aset dan liabilitas lainnya seperti aset tetap, utang dan piutang, persediaan, sampai aset neto tidak dilaporkan secara lengkap dan menyeluruh. Pada (Afkarina, 2019; Suherman, 2019) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren belum sesuai dengan standar yang berlaku. Aset yang dimiliki belum disajikan pada laporan keuangan Pesantren. Sedangkan pada analisis yang dilakukan Sulistiani (2020) menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan Pondok Pesantren masih berupa single entry. Laporan keuangan yang disusun Pondok Pesantren berupa laporan penerimaan dan pengeluaran uang beserta saldonya baik surplus maupun defisit. Aset yang dimiliki hanya dicatatkan pada laporan kepemilikan aset. Sedangkan pengukuran yang dilakukan menggunakan metode harga historis dan belum ada penyesuaian harga dengan nilai wajar saat ini atau fair value. Dengan tidak disajikannya laporan keuangan secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan standar akuntansi

yang berlaku menyebabkan akuntabilitas publik belum dapat terwujud.

Berbagai macam masalah terkait laporan keuangan pesantren yang tidak akuntabel tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pesantren. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Zulaihati (2021) hal tersebut disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan jumlah staf administrasi, pengelolaan keuangan yang masih manual, dan belum adanya penerapan laporan keuangan pesantren yang terintegrasi. Menurut Romalos (2020) hal tersebut juga disebabkan karena tingkat kepercayaan tinggi kepada pihak Pondok Pesantren dan tidak adanya tuntutan dari stakeholder untuk menyerahkan laporan keuangan atas sumbangan yang diberikan.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah Probability Sampling atau teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Lebih detail lagi, peneliti menggunakan teknik Cluster Sampling atau sampling area yang dilengkapi Stratified Random Sampling karena kecamatan pada Kota Bogor yang tidak berstrata. Kota Bogor memiliki 193 Pondok Pesantren yang tersebar di enam kecamatan, yaitu Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Tanah Sereal, dan Bogor Tengah. Perhitungan sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin (Priyono, 2016: 120).

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

n = Besar sampel

N = Besar populasi

e = Tingkat ketelitian sampel (10%)

Dari perhitungan tersebut didapat sampel sebanyak 66 pondok pesantren. Agar sampel yang diambil merepresentasikan populasi, maka pendistribusian sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Daerah	Populasi	Sampel
----	--------	----------	--------

No	Daerah	Populasi	Sampel
1	Bogor Barat	53	18
2	Bogor Selatan	47	16
3	Bogor Utara	30	10
4	Bogor Timur	22	8
5	Bogor Tengah	10	3
6	Tanah Sereal	31	11
Jumlah		193	66

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis pada metode kuantitatif adalah dengan menggunakan statistik. Dalam penelitian ini statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau mengilustrasikan data yang berhasil dikumpulkan apa adanya tanpa ada maksud untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Penggunaan statistik deskriptif pada penelitian ini hanya bertujuan untuk menjelaskan data sampel, dan tidak untuk menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi penelitian. Sedangkan, analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data sampel demi membuat kesimpulan yang dapat diberlakukan pada populasi adalah dengan statistik inferensial. Statistik inferensial cocok digunakan untuk populasi yang luas dan jelas dengan sampel yang diambil secara random.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan uji normalitas, uji regresi linier berganda, dan uji koefisien determinasi (R^2).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Deskriptif

Pada penelitian ini data dibagi menjadi tiga kategori yaitu, baik, cukup, dan kurang. Pengkategorian jawaban responden

menggunakan skor ideal dengan skala negatif, yaitu skor satu (1) sebagai nilai terbesar akan dikalikan dengan jumlah pertanyaan dan skor lima (5) sebagai nilai terkecil akan dikalikan dengan jumlah pertanyaan. Setelah nilai maksimum dan nilai minimum diketahui, kemudian kedua nilai tersebut akan dikurangi untuk mendapatkan interval data. Langkah selanjutnya peneliti akan mencari jarak interval, yang dilanjutkan dengan mencari jarak interval untuk setiap kategorinya.

Tabel 2. Tanggapan Responden pada Variabel Laporan Keuangan Pesantren (X)

Rentang Nilai	Kategori	f	%
31 - 71	Baik	7	11%
72 - 113	Cukup	11	17%
114 - 155	Kurang	48	73%
Total		66	100%

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa laporan keuangan pondok pesantren di Kota Bogor masih kurang, yaitu berada pada presentase 73% dengan jumlah 48 pondok pesantren. Sedangkan jumlah pondok pesantren yang memiliki laporan keuangan yang banyak hanya 11% atau sebanyak tujuh pesantren. Data penelitian ini sesuai dengan kondisi pondok pesantren di Kota Bogor yang kebanyakan adalah pondok pesantren salafi.

Tabel 3. Tanggapan Responden pada Sub Variabel Pengakuan Laporan Keuangan Pesantren (X_1)

Rentang Nilai	Kategori	f	%
12 - 27	Baik	8	12%
28 - 43	Cukup	17	26%
44 - 60	Kurang	41	62%
Total		66	100%

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa pengakuan laporan keuangan pada pondok pesantren di Kota Bogor masih kurang, yaitu dengan nilai 62% atau sebanyak 41 pondok pesantren. Sedangkan pondok pesantren dengan pengakuan laporan keuangan yang baik hanya 12% atau hanya sebanyak delapan

pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan kondisi kebanyakan pondok pesantren di Kota Bogor yang tidak mencatat transaksi keuangannya.

Tabel 4. Tanggapan Responden pada Sub Variabel Pengukuran Laporan Keuangan Pesantren (X_2)

Rentang Nilai	Kategori	f	%
6 - 13	Baik	11	17%
14 - 21	Cukup	20	30%
22 - 30	Kurang	35	53%
Total		66	100%

Melalui data pada tabel 10 dapat diketahui bahwa pengukuran laporan keuangan pondok pesantren di Kota Bogor masih kurang, yaitu sebesar 53% atau sebanyak 35 pondok pesantren. Adapun pengukuran laporan keuangan pondok pesantren yang baik hanya 17% atau sebanyak 11 pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan kondisi pondok pesantren di Kota Bogor yang kebanyakan tidak mencatat transaksi keuangan yang terjadi atau tidak mencatat nominal aset yang dimiliki.

Tabel 5. Tanggapan Responden pada Sub Variabel Penyajian Laporan Keuangan Pesantren (X_3)

Rentang Nilai	Kategori	f	%
13 - 30	Baik	5	8%
31 - 48	Cukup	8	12%
49 - 65	Kurang	53	80%
Total		66	100%

Data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa 80% atau sebanyak 53 pondok pesantren di Kota Bogor penyajian laporan keuangannya masih kurang. Sedangkan hanya 8% atau sebanyak lima pondok pesantren di Kota Bogor yang sudah memiliki penyajian laporan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan kondisi pondok pesantren di Kota Bogor yang kebanyakan menyajikan laporan keuangannya masih dalam bentuk *single entry* dan belum mengetahui informasi tentang pedoman

akuntansi pesantren yang sudah dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2018 lalu.

Tabel 6. Tanggapan Responden pada Variabel Akuntabilitas Publik (Y)

Rentang Nilai	Kategori	f	%
9 - 20	Baik	29	44%
21 - 32	Cukup	15	23%
33 - 45	Kurang	22	33%
Total		66	100%

Melalui data pada tabel 6 dapat diketahui bahwa 44% atau sebanyak 29 pondok pesantren di Kota Bogor memiliki akuntabilitas publik yang baik. Lalu 33% atau sebanyak 22 pondok pesantren kurang dalam segi akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Romalos (2020) yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada pengurus pondok pesantren. Sehingga meskipun laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, akuntabilitas publik masih dapat tercapai meskipun belum secara penuh.

Analisis Inferentif

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik uji regresi linear berganda yang dibantu dengan aplikasi SPSS.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	6.805	5.286	1.287	.203
Pengakuan	-.126	.295	-4.28	.670
Pengukuran	1.635	.489	3.342	.001
Penyajian	-.205	.110	-1.861	.067

Hasil Uji Hipotesis Satu (H_1)

Hasil uji pada tabel 7, memperlihatkan nilai signifikansi pengaruh pengakuan laporan keuangan pesantren sebesar $0,670 > 0,10$ dan t hitung $0,428 < t$ tabel $1,671$. Hal ini berarti H_1 ditolak atau pengakuan laporan keuangan

pesantren (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y).

Hasil Uji Hipotesis Dua (H_2)

Tabel 7 memperlihatkan nilai signifikansi pengaruh pengukuran laporan keuangan pesantren sebesar $0,001 < 0,10$ dan t hitung $3,342 > t$ tabel $1,671$. Hal ini berarti H_2 diterima atau pengukuran laporan keuangan pesantren (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y).

Hasil Uji Hipotesis Tiga (H_3)

Berdasarkan data pada tabel 7, dapat dilihat nilai signifikansi pengaruh penyajian laporan keuangan pesantren sebesar $0,067 < 0,10$ dan t hitung $1,861 > t$ tabel $1,671$. Hal ini berarti H_3 diterima atau penyajian laporan keuangan pesantren (X_3) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y).

Berdasarkan tabel 7, maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,805 - 0,126X_1 + 1,635X_2 - 0,205X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Publik
- X_1 : Variabel pengakuan
- X_2 : Variabel pengukuran
- X_3 : Variabel penyajian
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- e : Standar Error

Persamaan di atas mengandung arti:

- 1) Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar $6,805$. Hal ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas dan variabel terikat, bahwa jika semua variabel bebas yang meliputi pengakuan (X_1), pengukuran (X_2), dan penyajian (X_3) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka akuntabilitas publik adalah $6,805$.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel pengakuan (X_1) yaitu sebesar $-0,126$. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah antara variabel pengakuan dengan akuntabilitas publik.

Hal ini berarti jika variabel pengakuan mengalami kenaikan sebesar 1% , maka variabel akuntabilitas publik akan mengalami penurunan sebesar $0,126$. Dengan asumsi variabel lainnya konstan.

- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel pengukuran (X_2) yaitu sebesar $1,635$. Nilai yang dihasilkan menunjukkan pengaruh positif atau searah antara variabel pengukuran dengan akuntabilitas publik. Hal ini mengandung arti bahwa jika variabel pengukuran mengalami kenaikan sebesar 1% , maka variabel akuntabilitas publik akan naik sebesar $1,635$ dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel penyajian (X_3) yaitu sebesar $-0,205$. Hal ini menunjukkan jika variabel penyajian naik 1% maka variabel akuntabilitas publik akan turun sebesar $0,205$. Nilai negatif mengindikasikan pengaruh negatif atau berbanding terbalik.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Empat (H_4)

Model	df	F	Sig.
1 Regression	3	36.329	.000^b
Residual	62		
Total	65		

Hasil Uji Hipotesis Empat (H_4)

Tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi pengaruh variabel pengakuan (X_1), pengukuran (X_2), dan penyajian (X_3) laporan keuangan pesantren terhadap variabel akuntabilitas publik (Y) secara simultan sebesar $0,000 < 0,10$ dan nilai F hitung $36,329 > F$ tabel $2,17$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_4 diterima atau terdapat pengaruh pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pesantren secara simultan terhadap akuntabilitas publik.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.798^a	.637	.620

Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,637$.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pesantren memberikan pengaruh sebesar 63,7% terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain akuntabilitas publik.

Pembahasan

Pengaruh Pengakuan Laporan Keuangan Pesantren (X_1) terhadap Akuntabilitas Publik (Y)

Hasil uji pada tabel 7, memperlihatkan nilai signifikansi pengaruh pengakuan laporan keuangan pesantren sebesar $0,670 > 0,10$ dan t hitung $0,428 < t$ tabel $1,671$. Hal ini berarti H_1 ditolak atau pengakuan laporan keuangan pesantren (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y). Hasil ini sejalan dengan penelitian Romalos (2020) bahwa tingkat kepercayaan tinggi kepada pihak Pondok Pesantren menyebabkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pengakuan laporan keuangan pesantren terhadap akuntabilitas publik.

Pengaruh Pengukuran Laporan Keuangan Pesantren (X_2) terhadap Akuntabilitas Publik (Y)

Tabel 7 memperlihatkan nilai signifikansi pengaruh pengukuran laporan keuangan pesantren sebesar $0,001 < 0,10$ dan t hitung $3,342 > t$ tabel $1,671$. Hal ini berarti H_2 diterima atau pengukuran laporan keuangan pesantren (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y). Hal ini sejalan dengan teori Rahmawati & Krismiaji (2021: 8) yang menyatakan bahwa pengukuran atau *measurement* merupakan salah satu aspek vital dalam teori akuntansi. Apabila pondok pesantren mengukur transaksi keuangan dengan jujur dan apa adanya, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan para *stakeholder* kepada pihak pondok pesantren, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pondok pesantren.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pesantren (X_3) terhadap Akuntabilitas Publik

(Y)

Berdasarkan data pada tabel 7, dapat dilihat nilai signifikansi pengaruh penyajian laporan keuangan pesantren sebesar $0,067 < 0,10$ dan t hitung $1,861 > t$ tabel $1,671$. Hal ini berarti H_3 diterima atau penyajian laporan keuangan pesantren (X_3) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian Mawaddah et al. (2019) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

Pengaruh Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Laporan Keuangan Pesantren (X) terhadap Akuntabilitas Publik (Y) secara Simultan

Data pada tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi pengaruh variabel pengakuan (X_1), pengukuran (X_2), dan penyajian (X_3) laporan keuangan pesantren terhadap variabel akuntabilitas publik (Y) secara simultan sebesar $0,000 < 0,10$ dan nilai F hitung $36,329 > F$ tabel $2,17$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_4 diterima atau terdapat pengaruh pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pesantren secara simultan terhadap akuntabilitas publik. Hasil tersebut sesuai dengan teori akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018: 177) dapat terwujud bila laporan keuangan yang disajikan relevan dan andal. Juga sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Martini et al. (2020) bahwa inventarisasi dan pelaporan aset tetap berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pengakuan laporan keuangan pesantren tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik, pengukuran laporan keuangan pesantren berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

publik, penyajian laporan keuangan pesantren berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, juga secara simultan pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pesantren berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Berdasarkan pemaparan responden saat mengisi kuesioner, banyaknya pondok pesantren yang kurang pada pelaporan keuangan juga disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu pondok pesantren yang tidak memungut biaya sepeserpun pada seluruh santrinya (gratis), pondok pesantren menerapkan sistem pembiayaan silang (santri yang tergolong mampu menutupi biaya santri yang tergolong tidak mampu), pondok pesantren menerapkan sistem pembayaran secara infaq (tidak dipatok nominal minimal), pondok pesantren tidak memiliki donatur dari pihak eksternal, pondok pesantren menerapkan prinsip “Bila butuh tidak boleh meminta dan bila diberi tidak boleh menolak”, pengurus dan pimpinan pondok pesantren yang tidak mengetahui cara untuk membukukan keuangan dengan baik, para donatur yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas tanpa mengharuskan adanya laporan pertanggungjawaban atas itu, juga kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap figur kyai yang menjadi pusat pondok pesantren.

Saran

Tentunya terdapat beberapa kekurangan pada penelitian ini, untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih menyeleksi Pondok Pesantren yang dijadikan sampel penelitian menjadi hanya Pondok Pesantren yang sudah memiliki yayasan. Hal ini dikarenakan Pedoman Akuntansi Pesantren hanya dapat diterapkan secara menyeluruh pada Pondok Pesantren yang sudah berbentuk yayasan.

Daftar Pustaka

Afkarina, I. A. (2019). *Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Al-Anwari Banyuwangi (dalam Perspektif*

Pedoman Akuntansi Pesantren).

Azmi, S. N. (2019). *Analisis Implementasi Pencatatan Keuangan Berbasis Pedoman Akuntansi Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Indramayu)*.

Cahyana, A., Degita Azis, A., Lisnawati, L., & Anwar Masruri, M. (2022). Pengaruh Struktur Modal dan Intensitas Teknologi terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17, 69–79.

Darmi, I. (2021). *Analisis Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pelaporan Keuangan di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Tingkat Sebaran Populasi Pesantren*. emispendis.kemenag.go.id

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI OFFSET.

Martini, R., Arimbi, D. C., & Sari, K. R. (2020). Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 223–228. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>

Mawaddah, Murhaban, & Sari, D. K. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 5.

Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ZIFATAMA.

Rahmawati, & Krismiaji. (2021). *Teori Akuntansi Keuangan*. UPP STIM YKPN (Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Yayasan Keluarga Pahlawan Negara).

Riani, D. (2019). Analisa Akad Rahn dan Penerapannya pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri. *Neraca*

Keuangan: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan.

- Romalos, I. S. K. (2020). *Pencatatan dan Pelaporan Aktiva Tetap pada Pesantren sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Nurul Tsaqalain Desa Hila Kecamatan Laihitu Maluku Tengah).*
- Suherman, L. P. (2019). Analisis Pentingnya Akuntansi Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren Al-Matuq Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.18196/jati.020220>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi.* Pustaka Baru Press.
- Sulistiani, D. (2020). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 3, 31-48. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pelatihan Laporan Keuangan Pesantren di Pesantren Desa Cibitung Tengah Bogor. *Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah*, 1, 20-27. <https://doi.org/10.46306/jub.v1i1.5>
- Susilo, A., & Wulansari, R. (2020). Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. In *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* (Vol. 20, Issue 2). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/1325>.
- Tania, A. L. (2020). Urgensi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8.
- Yohani. (2019). Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pondok Pesantren. *Neraca*, 2, 1-9.